

Pemerintah Tegur Lima Maskapai Penerbangan

Tarif yang dikenakan tak sesuai dengan ketentuan.

JAKARTA — Kementerian Perhubungan memberikan surat teguran kepada lima maskapai penerbangan yang dinilai melanggar ketentuan tarif ekonomi untuk angkutan udara niaga berjadwal. Kelima maskapai itu adalah Lion Air, Merpati Airlines, Batavia Air, Mandala Airlines, dan Travel Express.

Direktur Jenderal Perhubungan Herry Bakti S. Gumay mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi berat kepada lima maskapai tersebut bila masih menyalahi ketentuan. "Melalui surat teguran itu, kami meminta mereka melakukan perbaikan," katanya seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ke-

marin.

Menurut Herry, jika nanti maskapai masih melakukan kesalahan lagi, pihaknya akan melakukan pengurangan frekuensi. "Kalau (maskapai) masih bandel, akan kami bekukan frekuensinya, dan permohonannya untuk membuka rute baru lagi akan kami tolak," ujarnya.

Sejak diberlakukan ketentuan tarif ekonomi, kata dia, pihaknya terus melakukan pengawasan. Sejumlah tim turun ke lapangan untuk memastikan apakah ketentuan dalam aturan tersebut dipatuhi oleh maskapai.

Dari berbagai temuan di lapangan, diketahui bahwa kelima maskapai

tersebut telah menetapkan tarif melebihi batas yang diizinkan, yakni maksimal sebesar 85 persen untuk maskapai kategori pelayanan minimum (*no frill*), sebesar 90 persen untuk kategori medium (menengah), dan 100 persen bagi maskapai berpelayanan penuh (*full service*).

"Dalam penerapannya, mereka mengenakan tarif kepada pengguna jasa di atas batas tarif yang ditentukan. Misalnya, untuk rute tertentu, batasnya Rp 1 juta, maskapai *no frill* seharusnya mengenakan tarif Rp 850 ribu di luar pajak dan asuransi. Ini ditarik lebih dari itu," kata Herry.

Dia meminta maskapai memberikan informasi secara terbuka tentang status kategori pelayanan dan besaran tarif yang akan dikenakan. "Airline juga ikut mensosialisasi di *counter* mereka kepada pengguna jasa," katanya. Herry menegaskan, pihaknya tak akan memberikan toleransi kepada maskapai yang menaikkan tarif tak sesuai dengan ketentuan.

Juru bicara Lion Air, Edward Si-rait, mengaku sudah menerima surat teguran dari regulator tersebut dan sudah memberikan jawaban. "Begitu terima surat teguran, kami cek data, dan kami langsung sampaikan jawaban," katanya kemarin.

Dia meminta *Tempo* menghubungi Kementerian Perhubungan untuk mengetahui jawaban dari Lion Air. "Biar tidak jadi polemik, silakan tanya ke Direktur Angkutan Udara mengenai jawaban kami," ujarnya.

Sejak pemberlakuan ketentuan tarif batas atas, kata dia, maskapainya tidak mengalami kesulitan. "Karena kami menggunakan sistem komputer," katanya.

Sementara itu, juru bicara Batavia Air, Eddy Haryanto, menolak menanggapi surat teguran regulator itu. "No comment. Saya belum bicara dengan direksi," ujarnya kemarin.

● APRIARTO MUKTIADI | MARIA RITA



ARNOLD SIMANJUNTAK (TEMPO)

Jepang Kucurkan Hibah ke PTPN

JAKARTA — PT Perkebunan Nusantara X menerima bantuan hibah berupa mesin, peralatan, dan modal kerja senilai US\$ 16 juta dari Organisasi Pengembangan Teknologi Industri dan Energi Terbarukan (NEDO), Jepang.

Dana hibah itu untuk membangun pabrik pengolahan bioetanol berbahan dasar *molasses*. *Molasses* adalah limbah industri gula, yang juga merupakan bahan dasar penyedap makanan.

"Bantuan ini strategis karena kami sedang melakukan revitalisasi industri gula," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Agus Tjahyana kemarin.

Menurut dia, pabrik yang akan dibangun memiliki kapasitas produksi sampai 30 ribu kiloliter per tahun. Total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan pabrik sekitar US\$ 25 juta. PTPN akan menyediakan US\$ 9 juta dari keuangan internal.

Agus menambahkan, selama ini Indonesia melakukan ekspor dalam bentuk mentah untuk diolah menjadi bioetanol. *Molasses* memiliki kelebihan karena efisiensinya dalam bioetanol sangat tinggi. Jika *pilot project* ini berhasil, pemerintah akan mengembangkan pengolahan bioetanol untuk jenis limbah minyak sawit.

Menurut Direktur Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Alexander Barus, pengolahan *molasses* menjadi produk bioetanol menggunakan teknologi baru dari Jepang, yang sudah diterapkan di Thailand. Kapasitas produksi harian bisa mencapai 100 kiloliter. "Pembangunan (pabrik) akan memakan waktu dua tahun, jadi perkiraan beroperasi pada 2013," katanya.

Direktur Utama PTPN X Subiyono menambahkan, pabrik di Jawa Timur menghasilkan *molasses* yang cukup untuk memproduksi bioetanol. Produksi *molasses* PTPN X mencapai 200 ribu ton per tahun atau sekitar 350-400 ribu ton per tahun jika digabung dengan produksi *molasses* dari petani. Selama ini 200 ribu ton *molasses* itu dijual ke pabrik bumbu masak dan diekspor.

Menurut Subiyono, dengan mengolah *molasses* di dalam negeri, nilai tambah dari pengolahan produk ini akan dinikmati di dalam negeri. Pabrik baru untuk pengolahan bioetanol akan dibangun di kawasan pabrik gula Gempol Kerep, Mojokerto, Jawa Timur.

Jepang, kata dia, sebenarnya melakukan survei terhadap PTPN X, XI, dan VII. Namun diputuskan PTPN X yang paling representatif. ● KARTIKA CANDRA

Permintaan Melonjak

Seorang mekanik menunjukkan onderdil *fuel pump* di Pusat Onderdil Mobil Cipete, Jakarta, kemarin. Permintaan pompa bahan bakar kendaraan melonjak akibat kerusakan yang diduga karena kualitas bahan bakar premium.

PLN Belum Akan Bangun Pembangkit Nuklir

JAKARTA — PT PLN (Persero) memastikan belum akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Menurut Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko PLN Murtaqi Syamsuddin, dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik hingga 2019, pembangkit listrik tenaga nuklir belum masuk.

"Sumber energi masih didominasi batu bara, panas bumi, dan gas," kata Murtaqi dalam diskusi tentang prospek PLTN dalam memenuhi kebutuhan listrik yang terjangkau di Jakarta kemarin.

Murtaqi menjelaskan, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan belum bisanya Indone-

sia menggunakan nuklir sebagai sumber energi, yaitu masalah dana, kebijakan, dan teknologi. "Biaya modal sangat tinggi, masa konstruksi yang sangat lama, dan ketidakpastiannya sangat menyulitkan perencanaan pembangunan pembangkit bertenaga nuklir itu," katanya.

Anggota Dewan Energi Nasional, Rinaldy Dalimi, menilai Indonesia tidak perlu membangun pembangkit bertenaga nuklir. Indonesia masih bisa tanpa pembangkit itu karena memiliki sumber daya energi terbarukan yang dapat menggantikan nuklir, seperti *biofuel*, air, dan panas bumi.

Jika membangun pembangkit bertenaga nuklir, risiko dan investasi yang harus ditang-

gung oleh pemerintah pun, menurut Rinaldy, sangat besar. Terutama karena Indonesia bukanlah negara penghasil uranium, sehingga nanti Indonesia harus mengimpor uranium dari negara lain.

"Dan itu harus dikawal oleh negara-negara besar," ujarnya. "Belum lagi Indonesia masuk dalam negara rawan gempa. Hanya Kalimantan yang aman dari gempa."

Rinaldy melanjutkan, untuk memenuhi kebutuhan listrik Jawa-Bali, berarti Indonesia harus memasang kabel lagi, yang biayanya bisa sangat mahal.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur dari daerah pemilihan Madura, Nizar Zahro, beberapa waktu lalu

sempat mengusulkan kepada pemerintah segera membangun pembangkit listrik bertenaga nuklir di Madura. Alasannya, krisis listrik di Madura tidak bisa diselesaikan kecuali membangun pembangkit sendiri.

Ia menilai solusi murah, tepat, dan jangka panjang untuk pembangkit listrik itu adalah pembangkit listrik bertenaga nuklir.

Anggota DPRD, Ahmad Nawardi, menambahkan, pada zaman Orde Baru, pemerintah sebenarnya berencana membangun pembangkit bertenaga nuklir di Desa Sukobenah, Ketapang, Sampang. Hanya, rencana ini batal lantaran masyarakat setempat menolak.

● GUSTIDHA BUDIARTIE | ROHMAN TAUFIQ